

**FAKTOR-FAKTOR HAMBATAN KEBERLANJUTAN KERJASAMA
INTERNASIONAL KOTA BANDUNG**

SKRIPSI

Oleh

Meitia Amanda

2216071009



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR HAMBATAN KEBERLANJUTAN KERJASAMA INTERNASIONAL KOTA BANDUNG

**Oleh
Meitia Amanda**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat keberlanjutan kerja sama internasional Kota Bandung dalam periode 2015–2025. Sebagai aktor subnasional dalam praktik paradiplomasi, Pemerintah Kota Bandung telah menjalin berbagai kerja sama internasional melalui skema sister city dan Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah kota di Asia, Eropa, dan Amerika. Meskipun secara kuantitatif jumlah kerja sama terus bertambah, tidak seluruh kemitraan tersebut mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen formal dan implementasi program kerja sama.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan pejabat Pemerintah Kota Bandung yang menangani kerja sama internasional. Analisis dilakukan menggunakan perspektif paradiplomasi dan institutionalism untuk memahami bagaimana struktur kelembagaan, regulasi, serta dinamika internal pemerintah daerah memengaruhi keberlanjutan kerja sama internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan keberlanjutan kerja sama internasional Kota Bandung dipengaruhi oleh sejumlah faktor institusional, yaitu keterbatasan kapasitas kelembagaan, panjangnya prosedur birokrasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, lemahnya integrasi antar perangkat daerah, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, perubahan kepemimpinan politik, serta belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan sebagian kerja sama berhenti pada tahap formalitas dan belum sepenuhnya menghasilkan dampak substantif. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pembenahan sistem evaluasi menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan kerja sama internasional Kota Bandung.

Kata kunci: Paradiplomasi, Kerja Sama Internasional, Keberlanjutan, Hambatan institusional, Kota Bandung.

ABSTRACT

FACTORS OBSTACLED TO THE SUSTAINABILITY OF INTERNATIONAL COOPERATION IN BANDUNG CITY

By

Meitia Amanda

Paradiplomacy refers to international activities conducted by local governments as subnational actors to support local development within the framework of national interests. Bandung City is one of the local governments actively engaged in international cooperation through sister city schemes and memoranda of understanding (MoUs) with cities in Asia, Europe, and America. However, despite the large number of partnerships established, not all have been implemented sustainably or generated tangible outcomes. This study aims to identify the factors that hinder the sustainability of Bandung City's paradiplomacy cooperation. This research employs a descriptive qualitative method using document analysis and interviews with officials of the Bandung City Government responsible for international cooperation. Data were analyzed using the perspectives of paradiplomacy and institutionalism. The findings indicate that sustainability is constrained by limited institutional capacity, lengthy bureaucratic procedures, weak inter-agency coordination, limited financial and human resources, political leadership changes, and the absence of effective evaluation mechanisms. Therefore, strengthening institutional frameworks, improving bureaucratic capacity, and enhancing monitoring and evaluation mechanisms are essential to ensure sustainable paradiplomacy in Bandung City.

Keywords: *Paradiplomacy, International cooperation, Local Government, institutionalism, Bandung City*

**FAKTOR-FAKTOR HAMBATAN KEBERLANJUTAN KERJASAMA
INTERNASIONAL KOTA BANDUNG**

Oleh

MEITIA AMANDA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR HAMBATAN KEBERLANJUTAN
KERJASAMA INTERNASIONAL KOTA BANDUNG**

Nama Mahasiswa : **Meitia Amanda**

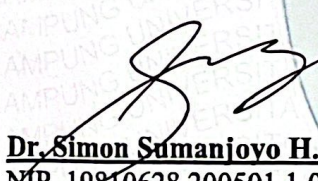
Nomor Pokok Mahasiswa : 2216071009

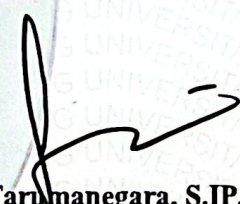
Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

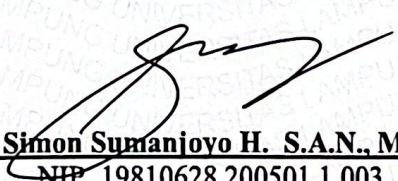
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Simon Sumanjoyo H. S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003


Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si, M.B.A.
NIP. 19800826 201404 1 001

Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Simon Sumanjoyo H. S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003

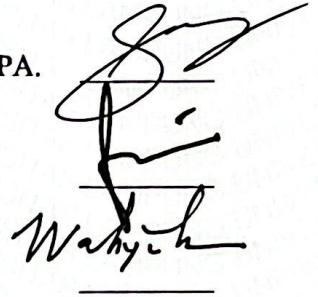
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

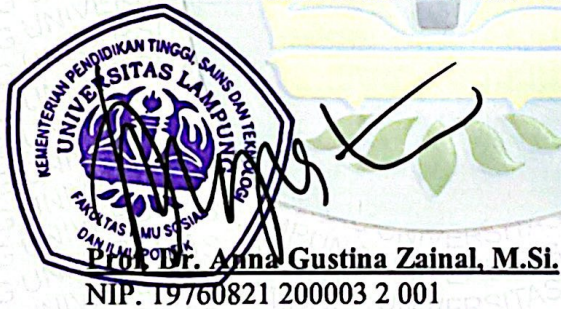
Ketua : Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.

Sekretaris : Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si.

Penguji Utama : Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Februari 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung

Bandar Lampung,

Yang membuat pernyataan,



Meitia Amanda
NPM. 2216071009

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Meitia Amanda, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 Mei 2004, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ma'ruf dan Ibu Ida Ernani.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak Arusyda II, diselesaikan pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar SD Negeri 1 Sukabumi, diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan ke SMP Negeri 31 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2019, dan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif dalam organisasi kampus yaitu PIK R – RAYA, selain itu penulis juga aktif dalam kepanitiaan kampus sebagai Liaison Officer (LO) pada acara PNMHII ke-36.

MOTTO

“ Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

(Maudy Ayunda)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan pengorbanan tanpa batas.

Dosen pembimbing dan seluruh dosen yang telah membimbing dengan sabar serta memberikan ilmu yang sangat berharga.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam setiap proses.

Serta almamater tercinta Universitas Lampung, tempat saya menimba ilmu, belajar, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Dan kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang dan tidak pernah menyerah hingga titik ini.

Semoga karya ini bermanfaat dan menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Paradiplomasi Kota Bandung dalam Implementasi Kerja Sama Internasional (2015 – 2025)*” dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung;
3. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, masukan, doa, serta bimbingan akademik selama perkuliahan berlangsung hingga proses penulisan skripsi;
4. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang selalu mengayomi, membimbing, membantu dan juga sabar dalam mengajari penulis selama bimbingan skripsi ini;
5. Mas Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang selalu memberikan pengajaran, pelajaran dan pengalaman hidup yang sangat berarti bagi penulis selama masa – masa skripsian ini, yang selalu memberikan pelajaran bukan hanya tentang skripsi tapi tentang kehidupan, karier dan akhlak, Terima Kasih Mas Gara atas support, motivasi, nasihat, do’a dan mempercayai penulis bahwa penulis mampu dan bisa.
- 6.

7. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si., selaku Dosen Penguji skripsi yang telah memberikan saran, motivasi dan wawasan baru dalam penulisan skripsi. Masukan dan dorongan yang selalu senantiasa hadir untuk memperbaiki kualitas penulisan, memperluas perspektif serta meningkatkan semangat penulis dalam proses pengerjaan skripsi;
8. Seluruh dosen, staf, dan tenaga kerja Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unila yang telah banyak membantu untuk mempermudah penulis dalam mengurus semua kegiatan dan telah meluangkan waktunya untuk penulis berkonsultasi terkait semua aktivitas perkuliahan;
9. Para Narasumber yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penelitian ini, yakni Ibu Christine Mugia Restu, S.IP, selaku Ketua Tim Kerja Sama Kota Bandung dan PIC Kerja Sama Bandung – Australia, Ibu Rizki selaku PIC Kerja Sama Bandung – Korea
10. Kedua orang tua penulis Ayah dan Ibu, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada ayah, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini. Untuk ibu, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.
11. Untuk Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan dan kehangatan, terima kasih telah menjadi rumah tempat penulis kembali, sekaligus tempat penulis belajar arti kebersamaan. Kehadiran kalian memberi kekuatan di setiap proses yang penulis lalui. Semoga keberhasilan ini menjadi kebahagiaan bersama;

12. Untuk Adik – adik Tersayang, Meifida, M. Fathir, Abudrrahman Karim, Avicenna Aiyra Karima Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan pengingat bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan hati. Kalian adalah alasan penulis ingin menjadi contoh yang baik. Semoga perjalanan ini bisa menginspirasi kalian untuk terus bermimpi dan percaya pada diri sendiri.
13. Untuk teman seperjuangan selama kuliah Alda Thalita Sita, Alda Thalita Cantik, Aldea Mei Sinta Putri, Kirana Andini Maheswari, Indah Ramadhani Atazawa Terima Kasih telah menemani perjalanan kuliah dari hari pertama hingga akhir. Terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, tawa, dan kekuatan yang kita bagi bersama. Kehadiran kalian membuat masa kuliah bukan hanya tentang belajar, tetapi juga tentang tumbuh dan bertahan bersama. Karya ini penulis selesaikan dengan penuh syukur karena pernah berjalan sejauh ini bersama kalian;
14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Rahmat Sanjaya, S.A.N., M. Si., Terima Kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan ini, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah dan yang selalu percaya bahwa penulis mampu dan bisa melalui ini semua. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui;
15. Untuk Teman-teman bimbingan seperjuangan, Tim Taman Kirana, Keysya, Ririn, Rinda, Tasya, Monic, Rinda, Ilyas, dan Syefiq, terima kasih telah menemani perjalanan ini dengan penuh semangat, kebersamaan, dan dukungan. Terima kasih atas diskusi, tawa, perjuangan, dan saling menguatkan di setiap proses yang kita lewati bersama. Kehadiran kalian menjadikan perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang tumbuh, belajar, dan bertahan bersama.
16. Untuk Teman-teman pejuang skripsi, M. Fiqri, Zefanya, Aura, Kevin, dan Rahmah Ghina, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dalam

proses yang penuh tantangan ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, diskusi, dan tawa di tengah lelah yang kita rasakan bersama. Kehadiran kalian menjadikan perjuangan skripsi bukan hanya tentang menyelesaikan penelitian, tetapi juga tentang saling menguatkan dan bertumbuh bersama.

17. Untuk Teman-teman KKN Desa Sumber Bahagia Lampung Tengah, Nadia Razak, Andika, Alfano, Fardan, Dina, dan Halimah, terima kasih telah menemani perjalanan pengabdian ini dengan penuh kebersamaan dan semangat. Terima kasih atas kerja sama, tawa, cerita, dan perjuangan yang kita lewati bersama. Kehadiran kalian menjadikan KKN bukan hanya tentang program kerja, tetapi juga tentang belajar, tumbuh, dan saling menguatkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teoritis.....	12
2.2.1 Paradiplomasi	12
2.2.2 Institutionalism	13
2.3 Kerangka Pemikir	15
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Fokus Penelitian.....	18
3.3 Pengumpulan Data	19
3.4 Sumber Data	20
3.5 Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1 Prakti-praktik Paradiplomasi Kota Bandung Melalui MoU dan Sister City	23
4.1.1 Kerangka Regulasi dan Landasan Hukum Kerja Sama Internasional Daerah	23

4.1.2	Proses Pembentukan dan Dinamika Kerja Sama Sister City Kota Bandung	27
4.1.3	Implementasi Program dan Orientasi Manfaat Kerja Sama Internasional Kota Bandung	29
4.1.4	Evaluasi dan Pemaknaan Keberhasilan Kerja Sama Internasional Kota Bandung	32
4.2	Faktor-faktor yang Menghambat Keberlanjutan Kerja Sama Paradiplomasi Kota Bandung	34
4.2.1	Hambatan Struktural dan Kelembagaan.....	35
4.2.2	Hambatan Prosedural dan Implementatif	40
4.2.3	Hambatan dalam Relasi dengan Mitra Internasional	44
4.2.4	Kesenjangan antara Kesepakatan Formal dan Implementasi Kerja Sama	48
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1	Kesimpulan.....	52
5.2	Saran.....	53
	DAFTAR PUSTAKA.....	55
	LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Kerja Sama Internasional Kota Bandung (1960-2025) ..	3
Tabel 1.2 Kerja Sama Internasional Kota Bandung yang Tidak Berkelanjutan Secara Optimal	5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Narasumber dan Instrumen Wawancara.....	59
Lampiran B Data Transkrip Wawancara Mendalam	63
Lampiran C Coding / Rangkuman Analisis	74
Lampiran D Bukti Wawancara dan Laman Data Sekunder	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradiplomasi di Indonesia telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama lintas negara dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Dasar hukum praktik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 363 sampai dengan Pasal 367, yang memberikan kewenangan bagi provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri, termasuk dalam bentuk *sister city* atau *sister province*. Meskipun demikian, seluruh kerja sama tersebut tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional, sehingga pelaksanaannya wajib memperoleh izin dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Dalam Negeri. Pengaturan ini memungkinkan daerah memanfaatkan potensi lokalnya dalam membangun hubungan internasional secara sah dan terkoordinasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 363–367).

Seiring diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 2001, banyak pemerintah daerah di Indonesia mulai aktif menjalin kerja sama internasional sesuai dengan potensi masing-masing. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, hingga tahun 2013 tercatat sebanyak 102 daerah telah menandatangani nota kesepahaman dalam bentuk *sister city* atau *sister province* (Kementerian Dalam Negeri, 2014). Perkembangan ini terus meningkat, di mana hingga tahun 2017 tercatat lebih dari 400 dokumen kerja sama internasional daerah yang telah difasilitasi oleh Kemendagri (Faishal & Yulianti, 2024). Mitra internasional daerah di Indonesia juga semakin beragam. Namun demikian, kerja sama tersebut lebih banyak terjalin dengan negara-negara Asia Timur, khususnya Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, dibandingkan dengan negara-negara Eropa seperti

Belanda dan Jerman. (Atikah et al., 2023); Beberapa penelitian menunjukkan praktik kerja sama internasional di berbagai daerah. Misalnya, Semarang menjalin kerja sama dengan sejumlah kota di Tiongkok dan Korea Selatan. Palembang bekerja sama dengan Kota Houston di Amerika Serikat serta beberapa kota di

Tiongkok. Surabaya bermitra dengan Kota Kitakyushu di Jepang dalam bidang lingkungan. Sementara itu, Bandung menjalin kerja sama sister city dengan Kota Braunschweig di Jerman. (Kusumaningjati, 2024). Dalam konteks ini, Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang cukup aktif memanfaatkan peluang paradiplomasi, khususnya di bidang pendidikan, teknologi, perdagangan, dan budaya (Alam & Sudirman, 2020).

Sebagai kota kreatif, Bandung memiliki karakteristik yang mendukung praktik paradiplomasi. Pada tahun 2015, Bandung resmi bergabung dalam UNESCO Creative Cities Network sebagai kota kreatif dunia di bidang desain (UNESCO, 2015). Keanggotaan ini didukung oleh keberadaan berbagai komunitas kreatif seperti Bandung Creative City Forum serta berkembangnya ekosistem industri kreatif lokal. Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif, terdapat lebih dari 450 pelaku usaha ekonomi kreatif di Bandung yang bergerak di sektor fesyen, kuliner, musik, dan seni visual (Bekraf, 2020). Kota ini juga menjadi pusat penyelenggaraan berbagai festival kreatif, seperti Helarfest, Bandung Design Biennale, dan Pasar Kreatif Jawa Barat yang melibatkan ratusan pelaku UMKM setiap tahunnya (Disbudpar Kota Bandung, 2021). Selain itu, keberadaan taman tematik, galeri seni, ruang pameran, serta perguruan tinggi seperti ITB, Telkom University, dan ISBI Bandung semakin memperkuat posisi Bandung sebagai kota kreatif (Kemenparekraf, 2022).

Modal sosial dan ekonomi tersebut mendorong Bandung untuk membangun jejaring kerja sama internasional yang semakin luas. Perkembangan kerja sama internasional Kota Bandung sejak tahun 1960 hingga 2025 dapat dilihat pada

**Tabel 1.1 Perkembangan Kerja Sama Internasional Kota Bandung
(1960-2025)**

No	Tahun	Mitra Kerja Sama	Negara	Kawasan	Bentuk Kerja Sama	Bidang Kerja Sama
1	1960	Braunschweig	Jerman	Erupa	Sister city	Pendidikan, budaya, pemuda, olahraga
2	1990	Fort Worth	Amerika Serikat	Amerika	Sister city	Pendidikan, pertukaran pemuda, seni budaya
3	1997	Suwon	Korea Selatan	Asia	Sister city	Pendidikan, ekonomi, budaya
4	2006	Liuzhou	Tiongkok	Asia	MoU	Pariwisata, teknologi, pendidikan, seni budaya
5	2006	Yingkou	Tiongkok	Asia	MoU	Perdagangan, ekonomi, industri
6	2008	Cotabato City	Filipina	Asia	Sister city	Pendidikan, budaya, pembangunan daerah
7	2012	Petaling Jaya	Malaysia	Asia	Sister city	Pendidikan, pariwisata, pengembangan kota
8	2015	(UNESCO Creative Cities Network)	Global	Multilateral	Jejaring kota	Ekonomi kreatif bidang desain
9	2016	Cuenca	Ekuador	Amerika Latin	Sister city	Pendidikan dan kebudayaan
10	2017	Namur	Belgia	Erupa	MoU	Smart city, halal tourism
11	2017	Hamamatsu	Jepang	Asia	LoI/MoU	Pendidikan, ekonomi, budaya
12	2017	Kawasaki	Jepang	Asia	MoU	Lingkungan hidup dan pengelolaan kota

13	2019	Toyama	Jepang	Asia	MoU	Transportasi ramah lingkungan, kota hijau
14	2020	Seoul (kerja sama tematik)	Korea Selatan	Asia	MoU tematik	Smart city dan teknologi
15	2025	Nanning	Tiongkok	Asia	Sister city	Teknologi, pertanian, kesehatan, ekonomi hijau

Sumber: diolah oleh peneliti berdasarkan daftar mitra kerja sama Kota Bandung

Berdasarkan data pada tabel tersebut, terlihat bahwa kerja sama internasional Kota Bandung mengalami peningkatan baik dari segi jumlah mitra maupun perluasan kawasan kerja sama. Awalnya, jejaring Bandung didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika, kemudian berkembang ke Asia sejak akhir 1990-an dan semakin intensif pada dekade 2000-an. Tren ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung semakin aktif memposisikan diri sebagai aktor subnasional dalam membangun hubungan lintas kawasan dalam sistem hubungan internasional multilevel.

Kerja sama internasional Kota Bandung tidak hanya meluas secara geografis, tetapi juga mencakup berbagai bidang strategis. Dalam bidang pendidikan, Bandung dan Fort Worth secara rutin menyelenggarakan program pertukaran pelajar, pelatihan, dan kegiatan kepemudaan sejak tahun 1990 (Fort Worth Sister Cities International, n.d.; Kemlu RI, 2025). Di bidang ekonomi dan teknologi, kerja sama dengan Nanning dan Liuzhou mencakup pengembangan pertanian cerdas, kecerdasan buatan, energi baru, serta kolaborasi ekonomi hijau (Jabarprov, 2025a; Jabarprov, 2025b). Di bidang seni dan budaya, kerja sama dengan Suwon ditandai dengan pertunjukan seni bersama, festival, serta pameran budaya (Komunitas Aleut, 2013). Selain itu, dalam bidang pariwisata, Bandung bersama Liuzhou dan Yingkou mengembangkan promosi wisata melalui paket bersama dan pertukaran delegasi resmi (Pemkot Bandung, 2006). Perluasan kerja sama ini menunjukkan bahwa paradiplomasi Kota Bandung tidak semata bersifat seremonial, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembangunan kota.

Meskipun demikian, tidak semua kemitraan yang dijalin dapat berjalan secara optimal. Kerja sama internasional Kota Bandung yang tidak berlanjut secara optimal dapat dilihat pada

Tabel 1.2 Kerja Sama Internasional Kota Bandung yang Tidak Berkelanjutan Secara Optimal

No	Mitra Kerja Sama	Tahun MoU/LoI	Bidang Kerja Sama	Kondisi Implementasi	Sumber
1	Namur, Belgia	2017	Smart city, halal tourism	Tidak ditemukan program lanjutan yang terdokumentasi secara berkelanjutan	Dokumentasi Pemkot Bandung; Penelusuran laporan resmi
2	Hamamatsu, Jepang	2017	Pendidikan, budaya, ekonomi	Masih berada pada tahap perjanjian formal tanpa implementasi program penuh	Wawancara Bagian Kerja Sama (2025)
3	Kawasaki, Jepang	2017–2020	Lingkungan hidup	Mengalami hambatan pendanaan, komunikasi, dan pandemi COVID-19 sehingga program tidak optimal	Wawancara; Laporan internal Pemkot (2025)
4	Braunschweig, Jerman	1960	Pendidikan, budaya, kota kembar	Aktivitas kerja sama menurun dan tidak menunjukkan keberlanjutan program aktif	Kurniati (2023)
5	Cuenca, Ekuador	2016	Pendidikan dan budaya	Tidak ditemukan laporan implementasi program lanjutan yang konsisten	(Safitri et al., 2023; Purnawan et al., n.d.)

Sumber: diolah oleh peneliti berdasarkan data kerja sama Paradiplomasi Kota Bandung yang tidak berlanjut

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh kerja sama yang telah ditandatangani mampu diimplementasikan secara berkelanjutan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara komitmen formal kerja sama internasional dengan realisasi program di tingkat praktis, sehingga sebagian kemitraan masih berhenti pada tahap simbolik.

Sebagai contoh, kerja sama Bandung–Braunschweig yang dimulai sejak 1960 sempat aktif melalui berbagai program pertukaran, tetapi sejak awal 2000-an tidak menunjukkan perkembangan lebih lanjut sehingga nota kesepahaman yang ada tidak lagi dijalankan secara nyata (Kurniawati, 2021). Demikian pula, hubungan Bandung–Suwon sejak 1997 mengalami fluktuasi dalam implementasi program, terutama karena paradigma yang memandang kerja sama tersebut hanya bersifat seremonial serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (Isna Pauziah Parihah & Nugroho, 2024; Studi Hambatan, n.d.). Kerja sama dengan Cuenca, Ekuador pada tahun 2017 yang difokuskan pada bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan teknologi juga mengalami stagnasi karena tidak adanya tindak lanjut program maupun peran aktif pemerintah kota (Purnawan et al., n.d.; Safitri et al., 2023). Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perjanjian formal dan realisasi operasional kerja sama, yang menjadi salah satu tantangan utama dalam praktik paradiplomasi Kota Bandung.

Apabila kondisi tersebut terus berlanjut, kegagalan implementasi kerja sama internasional dapat menimbulkan risiko hilangnya kepercayaan dari mitra luar negeri. OECD (2020) menyebutkan bahwa kegagalan pelaksanaan kerja sama daerah dapat mengurangi peluang memperoleh mitra baru di masa depan. Dalam konteks ini, posisi Bandung sebagai salah satu kota dengan jumlah kerja sama internasional yang cukup banyak berpotensi menghadapi risiko kehilangan kepercayaan, manfaat, serta kredibilitas di mata mitra luar negeri apabila stagnasi kerja sama terus berlanjut (Kementerian Luar Negeri RI, 2024). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan paradiplomasi Kota Bandung agar kerja sama internasional yang dibangun tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memberikan manfaat substantif bagi pembangunan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Paradiplomasi di Indonesia telah membuka ruang bagi daerah untuk menjalin kerja sama lintas negara sesuai dengan potensi masing-masing. Kota Bandung menjadi salah satu aktor daerah yang cukup aktif dalam paradiplomasi, terbukti dengan keanggotaannya di UNESCO Creative Cities Network dan berbagai kemitraan *sister city* dengan kota – kota di Asia, Eropa, hingga Amerika. Namun, meskipun jumlah kerja sama internasional Kota Bandung banyak, tidak semua dapat berjalan optimal. Beberapa kerja sama justru tidak berlanjut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara banyaknya nota kesepahaman yang ditandatangani dengan efektivitas implementasinya. Jika situasi ini terus berlanjut, Bandung berisiko kehilangan kepercayaan dari mitra luar negeri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang muncul adalah mengapa banyak kerja sama internasional Kota Bandung dalam bentuk MoU maupun *sister city* tidak berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Apa saja faktor – faktor yang menghambat keberlanjutan kerja sama paradiplomasi Kota Bandung?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan masalah yang penulis harapkan dapat tercapai melalui penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas:

1. Mendeskripsikan praktik paradiplomasi Kota Bandung dalam menjalin kerja sama internasional melalui MoU dan *sister city*.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberlanjutan kerja sama paradiplomasi Kota Bandung

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam studi paradiplomasi dan peran aktor subnasional dalam kerja sama internasional.

Melalui penggunaan perspektif institutionalism, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana struktur institusional, aturan formal, dan dinamika kelembagaan membentuk serta membatasi keberlanjutan kerja sama internasional di tingkat kota. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji paradiplomasi daerah, kerja sama sister city, maupun keterkaitan antara institusi domestik dan praktik hubungan internasional di negara berkembang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Bandung, mengenai faktor-faktor institusional yang memengaruhi keberlanjutan kerja sama internasional. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam memperkuat kerangka kelembagaan dan mekanisme pengelolaan kerja sama luar negeri di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain di Indonesia dalam memahami tantangan paradiplomasi sebagai bagian dari praktik hubungan internasional yang melibatkan aktor subnasional dalam kerangka kebijakan nasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu paradiplomasi dan kerja sama luar negeri pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian pertama yakni jurnal yang ditulis oleh Syuryansyah pada tahun 2020. Latar belakang penelitian ini adalah masih terbatasnya efektivitas paradiplomasi pemerintah daerah di Indonesia meskipun telah diberikan kewenangan melalui kebijakan desentralisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan neo-institutionalism untuk menganalisis bagaimana aturan formal, struktur kelembagaan, dan hubungan pusat–daerah memengaruhi praktik paradiplomasi Pemerintah Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradiplomasi daerah belum berjalan optimal karena keterbatasan kewenangan formal, lemahnya koordinasi lintas institusi, serta ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan luar negeri. Penelitian ini menegaskan bahwa kekuatan institusi domestik sangat menentukan ruang gerak aktor subnasional dalam hubungan internasional. Dengan demikian, penelitian ini relevan bagi gap penelitian karena menunjukkan bahwa keberlanjutan kerja sama paradiplomasi sangat dipengaruhi oleh struktur institusional yang membatasi kapasitas pemerintah daerah (Syuryansyah, 2020).

Penelitian kedua yakni karya Faishal dan Yulianti pada tahun 2024. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya kerja sama internasional Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui skema sister province, namun belum seluruh kerja sama tersebut menghasilkan dampak pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan kerangka paradiplomasi dan pendekatan institutionalism, khususnya dalam melihat hubungan antara aturan pusat, struktur birokrasi daerah, dan implementasi kerja sama luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama sangat ditentukan oleh konsistensi kelembagaan,

kepastian regulasi, serta dukungan institusi pusat terhadap inisiatif daerah. Namun, lemahnya integrasi kebijakan pusat–daerah sering menyebabkan kerja sama berhenti pada tahap formalitas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap gap penelitian karena menegaskan bahwa keberlanjutan paradiplomasi sangat bergantung pada kekuatan institusi dan mekanisme koordinasi lintas level pemerintahan (Faishal & Yulianti, 2024).

Penelitian ketiga karya Affandi, Alam, dan Dermawan pada tahun 2020. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya kerja sama sister city Kota Bandung yang telah ditandatangani, tetapi belum seluruhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan paradiplomasi dan dianalisis melalui perspektif kelembagaan dengan menekankan peran institusi lokal dalam implementasi kerja sama internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya integrasi antara program sister city dan perencanaan pembangunan daerah menyebabkan banyak kerja sama tidak berlanjut secara berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan fragmentasi kewenangan antarinstansi turut menghambat efektivitas kerja sama. Dengan demikian, penelitian ini relevan bagi gap penelitian karena menunjukkan bahwa keberlanjutan paradiplomasi sangat ditentukan oleh kekuatan institusi lokal dan keselarasan kebijakan pembangunan dengan agenda kerja sama luar negeri (Affandi et al., 2020).

Penelitian keempat yakni karya Intenilia dan Surya Putra pada tahun 2021. Latar belakang penelitian ini adalah perbedaan tingkat keberhasilan kerja sama sister city antara Kota Denpasar dan beberapa kota lain di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kerangka tiga lapis paradiplomasi Lecours (2008) serta pendekatan institutionalism, khususnya dalam menganalisis peran institusi formal dan kepemimpinan politik dalam mendukung kerja sama internasional daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Denpasar lebih berhasil karena memiliki struktur kelembagaan yang kuat, unit khusus kerja sama luar negeri, serta komitmen politik yang konsisten lintas periode pemerintahan. Sebaliknya, kota lain menghadapi hambatan berupa tumpang tindih kewenangan dan

lemahnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, penelitian ini relevan bagi gap penelitian karena menegaskan bahwa keberlanjutan paradiplomasi sangat ditentukan oleh desain institusi dan stabilitas kebijakan kelembagaan (Intentilia & Surya Putra, 2021).

Penelitian kelima yakni karya Basalama, dkk. pada tahun 2025. Latar belakang penelitian ini adalah kerja sama sister city antara Kota Tangerang Selatan dan Daejeon, Korea Selatan, yang menunjukkan dinamika implementasi yang berbeda-beda dalam setiap bidang kerja sama. Penelitian ini menggunakan kerangka paradiplomasi dan pendekatan institutionalism, khususnya dalam melihat bagaimana aturan formal, struktur organisasi pemerintah daerah, serta mekanisme koordinasi memengaruhi keberhasilan implementasi kerja sama internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, stabilitas kepemimpinan, serta kejelasan mekanisme evaluasi kerja sama. Namun, keterbatasan anggaran dan perubahan struktur organisasi sering kali menyebabkan kerja sama tidak berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini relevan bagi gap penelitian karena menunjukkan bahwa keberlanjutan kerja sama paradiplomasi ditentukan oleh kekuatan institusional dan konsistensi kebijakan lokal (Basalama et al., 2025).

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa kajian mengenai paradiplomasi di Indonesia umumnya masih menekankan pada aspek regulasi, struktur kelembagaan, serta dinamika hubungan pusat–daerah dalam pelaksanaan kerja sama internasional pemerintah daerah. Beberapa penelitian juga menyoroti praktik kerja sama sister city, namun belum secara spesifik mengkaji bagaimana faktor-faktor institusional memengaruhi keberlanjutan implementasi kerja sama tersebut dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji paradiplomasi Kota Bandung dengan menggunakan perspektif institutionalism masih relatif terbatas, padahal Bandung merupakan salah satu kota yang aktif dalam jejaring internasional dan memiliki banyak perjanjian kerja sama luar negeri.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menitikberatkan pada faktor-faktor yang menghambat keberlanjutan kerja sama paradiplomasi Kota Bandung. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk kerja sama internasional yang dijalankan, tetapi juga menganalisis bagaimana struktur kelembagaan, regulasi nasional, dan mekanisme koordinasi memengaruhi implementasi kerja sama tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian paradiplomasi berbasis institutionalism sekaligus kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat keberlanjutan kerja sama internasionalnya.

2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 Paradiplomasi

Paradiplomasi merujuk pada aktivitas hubungan internasional yang dilakukan oleh aktor subnasional, seperti pemerintah daerah, provinsi, dan kota, dalam rangka memperjuangkan kepentingan pembangunan lokal di luar kerangka diplomasi negara yang bersifat tradisional. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Duchacek dan Soldatos untuk menjelaskan meningkatnya peran aktor subnasional dalam politik internasional seiring dengan globalisasi, desentralisasi, dan meningkatnya kompleksitas hubungan lintas batas.

Menurut Kuznetsov (2015), paradiplomasi merupakan bentuk komunikasi politik lintas batas yang dilakukan oleh pemerintah subnasional guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan politik melalui kerja sama internasional. Paradiplomasi menandai pergeseran penting dalam studi Hubungan Internasional, dari sistem internasional yang sepenuhnya didominasi oleh negara menuju sistem yang bersifat multi-aktor dan multi-level, di mana kota dan pemerintah daerah turut menjadi pelaku aktif dalam proses diplomasi dan kerja sama global.

Dalam konteks ini, kota tidak lagi diposisikan sebagai unit administratif pasif, melainkan sebagai aktor politik yang memiliki kapasitas membangun jejaring internasional, melakukan negosiasi lintas batas, dan memanfaatkan institusi internasional serta jaringan kota global untuk mendukung kepentingan

lokal. Melalui mekanisme seperti sister city, city-to-city cooperation, dan keanggotaan dalam jaringan global seperti UNESCO Creative Cities Network, kota dapat membangun relasi internasional yang bersifat fungsional, pragmatis, dan berbasis kepentingan sektoral.

Namun demikian, paradiplomasi tidak berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya otonom. Aktivitas internasional aktor subnasional tetap dibingkai oleh struktur politik dan hukum negara, serta dipengaruhi oleh norma dan institusi internasional. Oleh karena itu, efektivitas paradiplomasi tidak hanya ditentukan oleh inisiatif politik lokal, tetapi juga oleh bagaimana aktor subnasional beroperasi dalam sistem institusional multilevel yang menghubungkan tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Kota Bandung merupakan salah satu contoh aktor subnasional yang aktif dalam praktik paradiplomasi melalui jejaring sister city dan keanggotaannya dalam UNESCO Creative Cities Network. Namun, meskipun memiliki banyak kerja sama internasional, tidak semua kerja sama tersebut berjalan secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan paradiplomasi tidak hanya bergantung pada jumlah hubungan internasional yang dibangun, tetapi juga pada kapasitas institusional yang memungkinkan aktor subnasional mempertahankan dan mengoperasionalkan kerja sama tersebut dalam jangka panjang.

Dengan demikian, konsep paradiplomasi dalam penelitian ini digunakan untuk memposisikan Kota Bandung sebagai aktor subnasional dalam sistem hubungan internasional, serta untuk memahami bagaimana kota tersebut berupaya membangun relasi lintas batas dalam kerangka diplomasi multilevel.

2.2.2 Institutionalism

Institutionalism dalam kajian Hubungan Internasional menekankan peran institusi dalam membentuk perilaku aktor serta pola kerja sama internasional. Robert Keohane (1989) mendefinisikan institusi sebagai *persistent and connected sets of rules, formal and informal, that prescribe behavioral roles, constrain activity, and shape expectations*. Definisi ini menegaskan bahwa institusi tidak hanya berbentuk organisasi formal, tetapi juga mencakup aturan, norma, dan

prosedur yang membingkai interaksi antaraktor dalam sistem internasional. Dengan adanya institusi, hubungan internasional menjadi lebih teratur dan dapat diprediksi karena aktor bertindak dalam kerangka aturan yang relatif stabil.

Lebih lanjut, North (1990) menjelaskan institusi sebagai *the rules of the game in a society*, yakni batasan-batasan yang diciptakan manusia untuk membentuk interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks hubungan internasional, institusi berfungsi sebagai mekanisme yang mengurangi ketidakpastian dengan menyediakan pedoman perilaku bagi aktor. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kerja sama internasional sangat dipengaruhi oleh kualitas dan stabilitas institusi yang mengaturnya. Ketika aturan dan prosedur bersifat kaku atau tidak adaptif, institusi justru dapat menjadi penghambat bagi berkembangnya kerja sama.

Dalam perspektif *institutionalism*, institusi tidak hanya memfasilitasi kerja sama, tetapi juga membatasi tindakan aktor melalui mekanisme yang bersifat *path dependent*. Pierson (2000) menjelaskan bahwa *path dependency* membuat kebijakan dan praktik yang telah mapan cenderung dipertahankan karena biaya perubahan yang tinggi. Akibatnya, aktor sering kali mengikuti pola kebijakan lama meskipun kondisi eksternal telah berubah. Konsep ini penting untuk memahami mengapa banyak kerja sama internasional dapat bertahan dalam bentuk formal, tetapi sulit berkembang menjadi program yang inovatif dan berkelanjutan.

Institutionalism juga relevan dalam menganalisis peran aktor subnasional, seperti pemerintah daerah, dalam hubungan internasional. Keating (1999) menyatakan bahwa paradiplomasi merupakan bentuk keterlibatan aktor subnasional dalam hubungan internasional yang tetap berada dalam batas-batas institusional negara. Pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan penuh dalam politik luar negeri, sehingga ruang geraknya dibentuk oleh aturan nasional, pembagian kewenangan, serta norma kebijakan luar negeri negara. Dalam kerangka ini, paradiplomasi dipahami sebagai praktik hubungan internasional yang bersifat terbatas dan terikat secara institusional.

Berdasarkan kerangka tersebut, teori institutionalism digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis keberlanjutan kerja sama paradiplomasi Kota Bandung. Pendekatan ini memungkinkan penelitian melihat kerja sama internasional tidak hanya sebagai hasil dari komitmen politik atau inisiatif individu, tetapi sebagai praktik yang dibentuk oleh struktur institusional, aturan formal, dan dinamika kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dengan demikian, institutionalism memberikan kerangka analitis yang relevan untuk menjelaskan mengapa sebagian kerja sama internasional Kota Bandung mampu berjalan secara berkelanjutan, sementara sebagian lainnya berhenti pada tahap formal atau simbolik.

2.3 Kerangka Pemikir

Paradiplomasi merupakan bentuk keterlibatan aktor subnasional, khususnya pemerintah daerah, dalam hubungan internasional untuk mendukung pembangunan daerah melalui kerja sama lintas batas. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Bandung telah menjalin berbagai kerja sama internasional melalui mekanisme Memorandum of Understanding (MoU) dan sister city dengan sejumlah kota mitra di luar negeri. Kerja sama tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam sistem hubungan internasional, terutama dalam bidang pendidikan, budaya, lingkungan, ekonomi kreatif, dan pertukaran masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua kerja sama tersebut berjalan secara berkelanjutan. Sebagian kerja sama berhenti pada tahap formalitas perjanjian atau mengalami keterbatasan dalam implementasi program. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan paradiplomasi tidak hanya ditentukan oleh adanya komitmen politik atau peluang kerja sama semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor institusional yang membentuk ruang gerak pemerintah daerah sebagai aktor subnasional.

Dalam perspektif teori paradiplomasi, pemerintah daerah dipandang sebagai aktor pelengkap diplomasi negara (*complementary diplomacy*) yang berperan dalam memperkuat hubungan antar masyarakat dan kerja sama teknis lintas kota. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada kapasitas

kelembagaan dan dukungan institusi yang mengatur pelaksanaan kerja sama luar negeri daerah. Sementara itu, teori institutionalism menekankan bahwa institusi formal seperti regulasi, struktur organisasi, prosedur birokrasi, serta institusi informal seperti norma kerja, pola koordinasi, dan budaya organisasi memengaruhi perilaku aktor dan hasil kebijakan yang dihasilkan.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini memandang praktik paradiplomasi Kota Bandung sebagai konteks empiris untuk mengidentifikasi faktor-faktor institusional yang menghambat keberlanjutan kerja sama internasional. Faktor-faktor tersebut meliputi struktur kelembagaan yang belum sepenuhnya terintegrasi, panjangnya prosedur birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, perubahan kepemimpinan politik, serta dinamika hubungan dengan mitra internasional. Faktor-faktor ini memengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama, sehingga berkontribusi pada munculnya kesenjangan antara perjanjian formal dan realisasi program di lapangan.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan institusi sebagai variabel kunci dalam menjelaskan keberlanjutan paradiplomasi Kota Bandung. Melalui identifikasi hambatan-hambatan institusional tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pemerintah daerah sebagai aktor subnasional beroperasi dalam sistem hubungan internasional, serta bagaimana penguatan kelembagaan dapat mendukung terciptanya kerja sama internasional yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal.



Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pemikiran

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menghambat keberlanjutan kerja sama paradiplomasi Kota Bandung dalam menjalin hubungan internasional. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika aktor, institusi, dan proses yang membentuk praktik hubungan internasional pada tingkat subnasional (Neuman, 2014).

Dalam penelitian ini, paradiplomasi dipahami sebagai aktivitas hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai aktor subnasional dalam sistem internasional. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan praktik kerja sama yang dijalankan, tetapi terutama menganalisis bagaimana struktur institusi, aturan formal, dan mekanisme koordinasi membentuk serta membatasi keberlanjutan kerja sama tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai hambatan institusional dalam praktik paradiplomasi Kota Bandung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor institusional yang menghambat keberlanjutan kerja sama paradiplomasi Kota Bandung dalam menjalin hubungan internasional. Faktor-faktor yang dimaksud mencakup struktur kelembagaan pemerintah daerah yang menangani kerja sama luar negeri, regulasi nasional dan daerah yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam hubungan internasional, mekanisme koordinasi dengan pemerintah pusat, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, perubahan kepemimpinan

politik, serta dinamika hubungan dengan mitra internasional. Fokus ini diarahkan untuk melihat bagaimana berbagai aspek institusional tersebut membentuk kondisi yang memengaruhi keberlangsungan kerja sama internasional yang telah dijalin oleh Pemerintah Kota Bandung.

Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan praktik paradiplomasi Kota Bandung, seperti bentuk kerja sama yang dijalankan, mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program, serta pola hubungan dengan mitra luar negeri, sebagai konteks empiris untuk memahami kemunculan berbagai hambatan tersebut. Pembahasan mengenai praktik paradiplomasi digunakan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kerja sama internasional dijalankan dalam kerangka institusi yang ada, tanpa menjadikan praktik tersebut sebagai fokus utama penelitian.

Dengan fokus ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi peran institusi formal dan informal dalam membentuk ruang gerak pemerintah daerah sebagai aktor subnasional dalam sistem hubungan internasional, khususnya dalam menjaga keberlanjutan kerja sama paradiplomasi Kota Bandung.

3.3 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu studi dokumen dan wawancara.

Pertama, studi dokumen dipahami sebagai proses mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai bahan tertulis, baik yang berbentuk resmi maupun nonresmi, untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Merriam & Tisdell, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari beberapa sumber utama, yaitu: website resmi Pemerintah Kota Bandung, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri; dokumen kerja sama internasional (MoU dan perjanjian sister city) yang telah ditandatangani; laporan dari UNESCO Creative Cities Network (UCCN); serta pemberitaan media nasional maupun internasional terkait aktivitas paradiplomasi Bandung. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur akademik berupa jurnal ilmiah, buku, serta laporan penelitian terdahulu yang membahas

paradiplomasi dan implementasi kebijakan. Dengan menggunakan teknik studi dokumen ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika paradiplomasi Kota Bandung, termasuk upaya implementasi kerja sama internasional dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Kedua, wawancara dilakukan untuk melengkapi data dari studi dokumen dengan informasi langsung dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bandung. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi mendalam mengenai implementasi kerja sama internasional yang dijalankan. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat atau staf Pemerintah Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kerja sama internasional. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh data mengenai pengalaman, pandangan, serta tantangan praktis yang dihadapi Pemda dalam menjalankan paradiplomasi.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer:

Pertama, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Data ini mencakup berbagai dokumen tertulis, publikasi resmi, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumbernya antara lain dokumen resmi pemerintah seperti website Pemerintah Kota Bandung (www.bandung.go.id), Kementerian Luar Negeri (www.kemlu.go.id), dan Kementerian Dalam Negeri (www.kemendagri.go.id), serta laporan yang berkaitan dengan kerja sama internasional dan paradiplomasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen kerja sama internasional berupa Memorandum of Understanding (MoU), nota kesepahaman, maupun laporan resmi terkait kemitraan sister city yang dijalin Kota Bandung. Sumber lainnya diperoleh dari publikasi organisasi internasional, khususnya dokumen dan laporan UNESCO Creative Cities Network (UCCN) (<https://en.unesco.org/creative-cities/>) yang berkaitan dengan status Bandung sebagai kota kreatif dunia di bidang desain. Data tambahan juga dikumpulkan dari media massa, baik nasional maupun internasional, seperti Kompas, The Jakarta Post, Tempo, dan Pikiran Rakyat. Literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah,

serta penelitian terdahulu yang relevan dengan isu paradiplomasi, kerja sama internasional, dan implementasi kebijakan juga digunakan sebagai referensi.

Kedua, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bandung yang berwenang dalam bidang kerja sama internasional. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pengalaman, pandangan, serta tantangan praktis yang dihadapi Pemda Bandung dalam menjalankan paradiplomasi. Dengan demikian, data primer ini melengkapi data sekunder sehingga analisis mengenai implementasi kerja sama internasional Kota Bandung menjadi lebih komprehensif.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahap utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pada tahap kondensasi data, peneliti memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan praktik paradiplomasi Kota Bandung dan faktor-faktor institusional yang memengaruhi keberlanjutan kerja sama internasional. Data yang telah terkumpul kemudian dikategorikan berdasarkan kerangka teori Paradiplomasi dan Institutionalism. Dalam perspektif paradiplomasi, peneliti mengidentifikasi bentuk keterlibatan aktor subnasional dalam hubungan internasional serta pola relasi lintas batas yang dibangun oleh Pemerintah Kota Bandung. Sementara itu, melalui perspektif institutionalism, peneliti mengelompokkan data yang berkaitan dengan pengaruh aturan formal, struktur kelembagaan, norma organisasi, serta mekanisme koordinasi terhadap perilaku aktor dalam implementasi kerja sama internasional.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun hasil analisis dalam bentuk narasi sistematis agar keterkaitan antara aktor, institusi, dan proses paradiplomasi dapat dipahami secara jelas. Penyajian data ini membantu peneliti melihat pola hubungan antara perjanjian formal dan praktik implementasi di lapangan.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menginterpretasikan temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah mengenai faktor-faktor yang menghambat keberlanjutan kerja sama paradiplomasi Kota Bandung. Kesimpulan ditarik dengan mempertimbangkan kerangka teoritis paradiplomasi dan institutionalism untuk menjelaskan bagaimana struktur institusional membentuk perilaku aktor subnasional dalam sistem hubungan internasional.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan kerja sama internasional Kota Bandung masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat institusional. Meskipun Kota Bandung tergolong aktif dalam menjalin paradiplomasi melalui skema sister city dan Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai mitra internasional, tidak seluruh kerja sama tersebut mampu diimplementasikan secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen formal kerja sama dengan realisasi program di tingkat implementasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama keberlanjutan kerja sama internasional Kota Bandung dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama, keterbatasan kapasitas kelembagaan yang tercermin dari belum optimalnya struktur pengelolaan kerja sama luar negeri di tingkat pemerintah daerah. Kedua, panjangnya prosedur birokrasi serta kompleksitas koordinasi dengan pemerintah pusat yang memperlambat proses implementasi kerja sama. Ketiga, lemahnya integrasi antar perangkat daerah yang menyebabkan program kerja sama tidak terkoordinasi secara efektif.

Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia turut memengaruhi keberlanjutan kerja sama, terutama dalam tahap implementasi dan tindak lanjut program. Dinamika politik lokal, khususnya perubahan kepemimpinan, juga berdampak pada keberlanjutan kebijakan paradiplomasi. Di sisi lain, belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi menyebabkan banyak kerja sama berhenti pada tahap formalitas tanpa menghasilkan dampak substantif bagi pembangunan daerah.

Dengan demikian, keberlanjutan paradiplomasi Kota Bandung tidak hanya ditentukan oleh jumlah kemitraan internasional yang dibangun, tetapi sangat bergantung pada kekuatan institusi domestik yang menopang implementasinya. Perspektif institutionalism dalam penelitian ini menegaskan bahwa faktor kelembagaan menjadi determinan utama dalam menentukan apakah kerja sama internasional daerah dapat berjalan secara berkelanjutan atau hanya bersifat simbolik.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya memperkuat keberlanjutan kerja sama internasional Kota Bandung. Pertama, Pemerintah Kota Bandung perlu memperkuat kapasitas kelembagaan pengelolaan kerja sama internasional melalui pembentukan struktur yang lebih terintegrasi dan profesional. Penguatan ini dapat dilakukan dengan memperjelas pembagian peran antar perangkat daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menangani kerja sama luar negeri, serta membangun sistem pengelolaan kerja sama yang lebih berkelanjutan dan berbasis program.

Kedua, diperlukan penyederhanaan mekanisme koordinasi dan birokrasi dalam pelaksanaan kerja sama internasional daerah, khususnya dalam hubungan pusat–daerah. Pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan ruang koordinasi yang lebih fleksibel tanpa mengurangi prinsip pengawasan, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang lebih adaptif dalam menjalankan paradiplomasi yang bersifat teknis dan pembangunan.

Ketiga, Pemerintah Kota Bandung perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama internasional yang telah dijalin. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga berbasis dampak program terhadap pembangunan daerah. Dengan adanya sistem evaluasi yang terukur, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kerja sama yang produktif, menghentikan kerja sama yang tidak efektif, serta memastikan keberlanjutan kemitraan yang memberikan manfaat nyata.

Keempat, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian paradiplomasi dengan pendekatan komparatif antar daerah atau menggunakan metode campuran (mixed methods) agar diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kerja sama internasional pemerintah daerah. Selain itu, kajian lanjutan juga dapat mengeksplorasi perspektif mitra internasional untuk melihat dinamika kerja sama secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, R. N., Alam, G. N., & Dermawan, W. (2020). The Government Of Bandung City's Efforts In Utilizing Foreign Sources: Case Study in Sister City Cooperation. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 124–136. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v6i2.26967>
- Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). (2020). *Website resmi Bekraf/Kemenparekraf*. <https://kemenparekraf.go.id>
- Criekemans, D. (2008). *Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?*. University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. (2021). *Website resmi Disbudpar Kota Bandung*. <https://disbudpar.bandung.go.id>
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Faishal, A., & Yulianti, D. (2024). Paradiplomasi Jawa Barat Melalui Kerja Sama Sister Province antara Jawa Barat dan Souss-Massa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 17(1), 122–134. <https://doi.org/10.20473/jhi.v17i1.54104>
- Fort Worth Sister Cities International. (n.d.). *Website resmi Fort Worth Sister Cities International*. <https://fwscinternational.org>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Horn, C. Van, & Meter, D. Van. (1975). *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*.
- Intentilia, A. A. M., & Surya Putra, A. A. B. N. A. (2021). From Local to Global: Examining Sister City Cooperation as Paradiplomacy Practice in Denpasar City, Bali, Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 357–367. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.357-367>
- Isna Pauziah Parihah, N., & Wahyu Nugroho, B. (2024). Implementation of Bandung – Suwon Sister City Cooperation to Improve the Quality of Education in Bandung City. *International Journal of Education and*

Digital Learning (IJEDL), 2(5), 89–95.
<https://doi.org/10.47353/ijedl.v2i5.165>

Kemenparekraf. (2022). *Info Grafis Subsektor Fesyen Kota Bandung*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

<https://katakreatif.kemenparekraf.go.id/assetsapi/country/pdf/1656051710843-kotakreatif-38.Profil-Kota-Bandung.pdf>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (n.d.). *Website resmi Kemlu RI*.
<https://kemlu.go.id>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Data Sister City*.
<https://www.kemendagri.go.id>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Data Sister City*.
<https://www.kemendagri.go.id>

Kurniawati, N. K. (2021). Implementasi Kebijakan Sister City Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig (Jerman). *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 5(1), 11–25.
<https://doi.org/10.31506/jipags.v5i1.9426>

Komunitas Aleut. (2013). *Website resmi Komunitas Aleut*.
<https://komunitasaleut.com>

Lasswell, H. D. (1951). *The Policy Orientation*. In D. Lerner, & H.D. Lasswell (Eds.), *The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method*. CA: Stanford University Press.

Malik, Y. I. (2023). Unveiling the Implementation of Bandung-Cuenca Sister City Relationship on Indonesian Cultural Diplomacy. *Journal of Paradiplomacy and City Networks*, 2(2), 99

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* ((4th ed.)). CA: Jossey Bass.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.

Mukti, T. A. (2013). Paradiplomacy: The Rise of Local Actor in International Fora. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*, 1(1), 85–94.

Nadya, A., Mahendra, Z. F., & Yahya, M. M. (2023). Strategizing Sister City Partnerships: Paradiplomacy, Bilateral Relations, and Sustainable Cooperation in Indonesia. *Journal of Paradiplomacy and City Networks*, 2(1), 46–57. <https://doi.org/10.18196/jpcn.v2i1.35>

Neuman, W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative*

Approaches. Essex.

Nugroho, R. (2017). Public policy : Teori kebijakan - analisis kebijakan - proses kebijakan perumusan, implementasi, evaluasi, revisi risk management dalam kebijakan publik, kebijakan sebagai the fifth estate - metode penelitian kebijakan. PT Elex Media Komputindo. OECD. (2020). Education at a Glance 2025.

https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2025_1c0d9c79-en.html

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2025a). Website resmi Jabarprov. <https://jabarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2025b). Website resmi Jabarprov. <https://jabarprov.go.id>

Purnawan, C., Ifa, D., Mustikadara, S., Si, M., Kunci, K., & Bandung, : (n.d.). Kampanye Sister City Bandung Braunschweig Untuk Membuka Peluang Kerjasama Kreatif Antar Kedua Kota. Jurnal Tingkat Sarjana Bidang Senirupa Dan Desain, 1–9.

Sabati, C. L. (2024). Evaluating the Impact of Sister City Cooperation between Bandung and Kawasaki on Environmental Sustainability. Journal of Paradiplomacy and City Networks, 3(1), 54–66. <https://doi.org/10.18196/jpcn.v3i1.45>

Safitri, N., Syafira, S. P., & Kurniawati, D. E. (2023). Analisa Faktor Penyebab Kegagalan Sister Cities di Indonesia. Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 6(1), 56–68. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i1.2016>

Smart City Indonesia. (2024). Website resmi Smart City Indonesia. <https://smartcityindo.com>

Tavares, R. (2016). Paradiplomacy: Cities and States as Global Players. Oxford University Press.

UNESCO. (2015). Jaringan Kota Kreatif. Wwww.Unesco.Org. <https://www.unesco.org/en/creative-cities/bandung>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah